

# AS, Perang, dan Kebebasan Pers

Awang Ruswandi

---

## ABSTRAK

*Perang ternyata telah membawa AS kepada satu situasi yang buruk bagi kebebasan persnya. Meski kebebasan media massa AS dilindungi the First Amendment, namun pada pelaksanaannya di lapangan, praktik-praktik pengingkaran terhadap nilai-nilai kebebasan, tetap saja berlangsung. Kebebasan yang selalu menjadi acuan media, tampaknya tak lagi kebal terhadap tekanan pemerintah. Kebebasan yang kerap didengungkan itu nyatanya tak berkuat ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut eksistensi pemerintah dan kerahasiaan negara*

---

Pengalaman pahit yang mencoreng nilai kebebasan pers dialami media massa Amerika Serikat (AS), sehubungan dengan adanya serangan AS ke Afghanistan akhir tahun 2001. Gedung Putih telah melarang jaringan TV ABC, CBS, CNN, NBC, dan Fox menayangkan rekaman video Usamah bin Ladin, karena dikhawatirkan Usamah akan memberikan kode-kode khusus kepada pengikutnya lewat tayangan tersebut. Menurut *The New York Times*, media cetak juga diimbau untuk tidak memuat transkrip lengkap dari pesan-pesan Usamah tersebut. Bahkan Departemen Luar Negeri AS juga mencoba memblok siaran radio *Voice of America* mengenai wawancara dengan pejabat Taliban, demikian laporan *Associated Press* (AP) (<http://www.freedomforum.org/tempaltes/document.asp?documentID=15124>)

Ketakutan yang berlebihan dari pemerintah AS menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak populer untuk perkembangan media massa di AS. Larangan itu justru terlihat konyol, mengingat terjadinya di AS, tempat di mana segala teknologi informasi canggih berkembang pesat. Walaupun jaringan televisi maupun media cetak tidak menyiarkan pesan-pesan dari Usamah, pengikutnya pasti memperoleh informasi melalui berbagai macam cara dengan dukungan teknologi

canggih lainnya. Yang jelas, adanya larangan dari pihak pemerintah AS ini akan menambah daftar panjang tekanan pemerintah terhadap media massa mereka.

Padahal, AS sering dijadikan kiblat dan barometer bagi kebebasan pers negara mana pun di dunia. Bukan hal yang asing lagi, ketika orang membicarakan masalah kebebasan pers, maka banyak orang merujuk ke AS sebagai negara dengan tingkat kebebasan pers yang tinggi. Hasil survey tentang kebebasan pers tahun 2000 yang diselenggarakan *Freedom House* menunjukkan AS menempati skor kebebasan tertinggi (*free category*). Menurut hasil survey tersebut skor yang diperoleh AS adalah 1-15 (skor 0-30 = *free press*; 31-60 = *partly-free press*; 61-100 = *not-free press*) (<http://www.freedomhouse.org/pfs2000>).

Survey yang dilakukan *Freedom House* ini dilakukan terhadap hampir semua negara di dunia ini. Penelitian ini antara lain melihat aturan-aturan dan hukum pers di setiap negara, tingkat ekonomi politik yang mempengaruhi isi jurnalistik, dan kasus-kasus aktual dari pelanggaran kebebasan pers – mulai dari pelecehan terhadap wartawan dan organisasi mereka sampai kepada serangan fisik dan pembunuhan terhadap reporter, dan pelarangan atas fasilitas-fasilitas penyiaran dan percetakan.

Dari survey tersebut, tingkat kebebasan pers AS masih seperti yang diduga orang selama ini. Barangkali orang sudah maffhum kalau tingkat kebebasan pers di negeri ini menempati tingkat kebebasan yang sangat tinggi. Perlu diketahui pula bahwa survey tersebut dilakukan saat keadaan negara sedang "aman-aman" saja. Survey dilakukan sebelum peristiwa runtuhnya menara kembar *World Trade Center (WTC)*, 11 September 2001.

Namun, kalau kita menelaah perjalanan sejarah kebebasan pers di AS, tidak selamanya kebebasan pers itu benar-benar terwujud utuh. Sejarah AS memperlihatkan bahwa sebenarnya tingkat kebebasan pers seperti itu hanya terjadi pada saat kondisi negara sedang dalam keadaan normal. Tingkat kebebasan pers AS akan berbeda jika negeri ini sedang menghadapi perang atau konflik dengan negara lain.

Perang bagi pemerintah AS tampaknya merupakan agenda penting yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jika pemerintah AS sudah menyatakan sebuah perang, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Karena begitu pentingnya agenda perang, media massa AS yang kebebasannya dilindungi *the first amendment*, tak bisa berbuat banyak untuk menginformasikan masalah peperangan kepada publiknya.

Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa perang ternyata telah membawa AS kepada satu situasi yang buruk bagi kebebasan persnya. Atas alasan demi keamanan negara dan kerahasiaan informasi intelejen, maka media massa AS tak dapat berbuat banyak dengan kebebasannya dalam suasana perang dari abad ke abad. Pengalaman pahit itu sudah ada sejak negeri ini baru meraih kemerdekaannya (perang sipil), dalam Perang Dunia I dan II, invasi AS ke Kuba, Perang Korea dan Vietnam, invasi ke Grenada (1983), Teluk Persia (1991), sampai dengan serangan ke Afghanistan (2001).

## **Restriksi Pemerintah AS dari Masa ke Masa**

Bangsa Amerika sudah menganggap bahwa

media mereka adalah institusi yang menjunjung tinggi kebebasan. Dengan kata lain, media merupakan pilar demokrasi. Melalui medialah nilai-nilai kebebasan dapat ditegakkan. Konstitusi juga sudah mendukung kondisi ini. Bahkan, kebebasan pers ini ditempatkan dalam konstitusi AS sebagai hal yang sangat penting. Karena begitu pentingnya, maka ia ditempatkan sebagai *the First Amendment*. Dengan demikian maka media harus bebas dari campur tangan siapa pun.

*A basic assumption of many US citizens is that "our" media are indeed free, diverse, and abundantly opinionated. This freedom is guaranteed by the First Amendment to the Constitution, by the absence of government control over media, and by the fact the media are owned by many different firms, not just one business. US media are proudly claimed to be the best in the world, holding up torch of liberty to less fortunate countries (Downing et. al., 1990: 73).*

Oleh karena itu, dalam tradisi kehidupan di sana, memang setiap individu dijamin hak-haknya untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sistem media yang berkembang di Amerika adalah sistem libertarian, yang mengandung makna kebebasan. Media bebas mengemukakan pendapat apa saja, dan pula mengkritik siapa saja. Menurut Graber (1980: 113), pers berfungsi sebagai mata dan telinga bagi publik. Selain itu, pers berperan pula sebagai *watchdog* bagi pemerintah.

Dalam tataran ideal, hubungan antara media massa, publik, dan pemerintah seharusnya berjalan tanpa adanya saling intervensi. Namun dalam kerangka hubungan media massa dengan pemerintah, kadar hubungan di antara keduanya memang tidak selamanya baik. Sesuai dengan kurun waktu sejarah masyarakat AS, hubungan di antara kedua institusi ini diwarnai oleh beberapa kontroversi. Falsafah dasar yang menjadi landasan berpikir sistem media di AS, seringkali menemui jalan buntu tatkala media berhubungan dengan pemerintah, terutama saat-saat genting seperti perang.

Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, praktik-praktik pengingkaran terhadap nilai-nilai

kebebasan tetap ada atau berlangsung. Kebebasan yang selalu menjadi acuan media liberal tampaknya memiliki kelemahan, dan juga ternyata tidak kebal terhadap tekanan pihak pemerintah. Kebebasan yang selalu didungungkan itu ternyata tak berkutik ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut eksistensi pemerintah dan kerahasiaan negara. Walaupun kebebasan pers dijamin konstitusi, tetapi tangan pemerintah lebih kuat tenaganya untuk mengenyampingkan konstitusi, demi kerahasiaan dan keselamatan negara versi pemerintah.

Hubungan media dan pemerintah, kemudian menjadi sesuatu hal yang penting bagi keberadaan media massa. Dalam perkembangan sejarah AS, hubungan ini dapat dilihat dari bagaimana seorang presiden (eksekutif) menerapkan kebijakannya terhadap media massa. Hubungan itu pun kemudian berjalan sangat bervariasi, karena kebijakan presiden tadi tidak sama satu dengan lainnya. William L. Rivers dalam *The Mass Media and Modern Society* menulis, para pemimpin Amerika sebenarnya menginginkan adanya pers yang independen dan bebas untuk mengontrol pemerintah, namun dalam praktiknya mereka tidak menginginkan hal itu terjadi (Rivers, Peterson, & Jensen, 1971: 105).

Thomas Jefferson adalah tokoh AS yang terkenal dengan konsep kebebasannya. Jefferson pernah mengatakan bahwa pers merupakan sumber esensial dari informasi dan bimbingan, dan agar dapat melaksanakan fungsinya secara tepat dalam negara demokrasi, pers harus bebas dari pengawasan pemerintah. Menurut Jefferson, fungsi utama dari pemerintah adalah membangun dan memelihara kerangka kerja di mana orang-perorangan dapat mengejar kepentingan sendiri. Fungsi pers adalah untuk berpartisipasi dalam pendidikan orang per orang dan pada saat yang sama juga menjaganya dari penyimpangan oleh pemerintah dari tujuan semula (Siebert, *et. al.*, 1963: 47).

Namun kenyataannya, pemikiran Jefferson itu tidak tercermin secara utuh dalam tindakan-tindakan politiknya sehari-hari ketika dia duduk dalam pemerintahan. Pada masa awal Amerika

merdeka, pemerintah melalui Jefferson — ketika itu masih menjadi anggota kabinet Presiden George Washington — justru mendirikan surat kabar sendiri versi pemerintah, yakni *Gazette of the United States*. Penerbitan ini disebut sebagai *the party press*. Surat kabar tersebut adalah alat dan corong pemerintah. Salah satu yang patut dicatat di sini adalah bahwa surat kabar ini pun dipakai untuk menyerang kaum *federalist* pimpinan Hamilton. Keadaan ini terus berlanjut ketika Jefferson menjadi presiden. Peranan Jefferson yang begitu kuat pengaruhnya dalam mengatur pers, maka bentuk *the party press* terus ada sampai masa presiden-presiden berikutnya (Rivers, Peterson, & Jensen, 1971: 106-108).

Ketika Jefferson berada dalam kekuasaan, tampaknya dia lupa apa yang diucapkannya. Kata-kata dia yang berbunyi “*agar dapat melaksanakan fungsinya secara tepat dalam negara demokrasi, pers harus bebas dari pengawasan pemerintah*”, tidak terbukti dalam praktik pemerintahannya. Dengan dibentuknya *the party press*, pers tidak berada dalam pengawasan pemerintah, tetapi justru berada dalam genggamannya pemerintah dan pers menjadi alat pemerintah. Hal ini adalah sebuah pengingkaran dari teori pers libertarian.

Contoh yang ekstrem barangkali terjadi saat Presiden Andrew Jackson berkuasa. Jackson lebih jauh lagi mengatur kehidupan pers. Bahkan ia dijuluki sebagai presiden pertama yang mengatur negeri dengan surat kabar. Karena memang, Jackson dapat “menguasai” jurnalis-jurnalis kenamaan untuk dijadikan juru bicaranya. Pada pemerintahan Jackson ini, pemerintah dapat membuat *public opinion* palsu yang seolah-olah ada pendapat umum, padahal pendapat itu “dibuat” oleh jurnalis-jurnalis yang dekat dengan presiden, dan surat kabar-surat kabar di daerah “wajib” memuat pendapat tersebut (Rivers, Peterson, & Jensen, 1971: 109-110).

Contoh lain dari adanya campur tangan pemerintah terhadap pers adalah diundangkannya *Alien and Sedition Law* pada tahun 1798. Undang-undang atau aturan hukum ini merupakan usaha untuk memberi kekuatan kepada pemerintah dalam melindungi dirinya dari kritik yang tak

berdasar. Pelaksanaan hukum ini oleh kaum *federalist* untuk tujuan-tujuan politik partisan, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah tertanam dalam masyarakat AS. Memang, usaha-usaha semacam ini tidak dilakukan lagi pada abad ke-19. Pada saat munculnya demokrasi Jacksonian, hukum ini terhapus sama sekali (Siebert, *et. al.*, 1963: 56).

Dengan melihat contoh di atas, tampak bahwa sejak AS baru merdeka, kebebasan pers tidak bisa bebas leluasa bergerak. Campur tangan pemerintah tetap ada. Di masa awal ini saja kebebasan itu sudah berbenturan dengan sistem politik dan pemerintahan AS. Pers liberal sekalipun, tampaknya tidak kuasa ketika berhadapan dengan sistem politik yang ada.

Pada abad ke-20, perkembangan pers AS ini juga menghadapi masalah ketika berhadapan dengan pihak pemerintah, terutama ketika menghadapi peristiwa seperti Perang Dunia I dan II. Menurut Siebert, doktrin libertarian tidak punya persiapan menghadapi perubahan yang sangat cepat yang terjadi akibat perang dunia atau pun perang lokal. Secara samar-samar, para penganut libertarian mengakui bahwa sebuah pemerintahan punya hak melindungi diri dari kehancuran dalam situasi-situasi tertentu, tetapi mereka tidak membuat analisis logis tentang sejauhmana sebuah negara dapat membungkam kebebasan berekspresi di masa perang (Siebert, *et. al.*, 1963: 57).

Semasa Perang Dunia I saja pers Amerika harus menghadapi sebuah kenyataan tentang begitu kuatnya kontrol pemerintah terhadap pers, terutama terhadap berita-berita yang berkaitan dengan perang. Pada waktu itu, pemerintah AS membentuk sebuah sistem penyensoran terhadap pesan-pesan yang masuk maupun ke luar, walaupun tidak berusaha membungkam media massa yang berada dalam batas-batas teritorial AS. Hubungan yang bersifat simbiosis mutualistis dikembangkan antara pemerintah dengan pihak media massa — terutama surat kabar dan majalah, yakni dalam hal perlunya penyensoran sukarela. Jadi, pemerintah secara halus sudah mengontrol media dengan cara mengimbau media agar mau melakukan

penyensoran secara hakus demi menjaga martabat bangsa dari serangan musuh.

Menurut Siebert, sistem yang sama dengan prosedur yang lebih baik, diterapkan pula selama Perang Dunia II. Bahkan, untuk Perang Dunia II ini, pembatasan dilakukan juga terhadap radio. Jadi, pemerintah bekerjasama dengan pers telah berusaha mencegah tersebarnya informasi yang akan merugikan bangsa. Hal-hal semacam itu dianggap sebagai kemunduran dan pada Perang Dunia II inilah puncak kemunduran dari kebebasan pers.

Pada perkembangan zaman berikutnya pun konflik antara pers yang bebas dengan kontrol pemerintah terus berlangsung. Ketegangan-ketegangan baru dari zaman nuklir dan Perang Dingin mengakibatkan para pejabat pemerintah kadang-kadang terlalu banyak menggunakan cap “paling rahasia”. Seorang menteri pertahanan setelah krisis peluru kendali Kuba, pada tahun 1962, bersikeras bahwa pemerintah memiliki hak dan suatu kebutuhan untuk “mengelola berita”, termasuk hak untuk menahan informasi atau menyebarkan kepalsuan.

Pemberitaan perang Vietnam pun tak luput dari pembatasan pihak pemerintah. Kasus *Pentagon Papers* telah membuktikan bahwa kekuasaan pemerintah untuk mengontrol pers begitu besar. Pers dihalang-halangi (dengan jalan menyembunyikan dokumennya) untuk menyiarkan ihwal perang ini secara mendetail. Kementerian Kehakiman telah mengajukan *The New York Times* dan *The Washington Post* ke pengadilan federal untuk menghentikan penerbitan tentang keterlibatan AS pada Perang Vietnam. Walaupun kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat kabar tersebut dapat terus menerbitkan berita-berita tentang Vietnam, tetapi kejadian ini adalah bukti bahwa pihak pemerintah masih berupaya untuk mengontrol pers (lihat Basuki, 1995).

Jika tidak ada keputusan Mahkamah Agung AS dan Presiden Nixon tidak jatuh dari kursi kepresidenannya, niscaya media massa di sana saat itu akan terus berada di bawah tekanan rezim Nixon. Pada masa itu Presiden Nixon terkenal sebagai master dalam mengontrol informasi.

Penber (1977: 300) lebih jauh menyatakan:

*Nixon was a master of centralizing the control of information. Nobody released any good news or bad news without his authority. Some cabinet members were even instructed what to say. Nixon demanded that his appointees stay in line and not speak out of turn. And when these people talked to the press they had to reflect the ideas of the administration, not their own ideas.*

Pada masa yang lebih mutakhir lagi, restriksi semacam itu masih terus berlangsung. Misalnya, ketika tentara AS melakukan invasi ke Pulau Grenada atas perintah Presiden Ronald Reagan tahun 1983, kalangan media massa diimbau untuk tidak menyiarkan berita penyerbuan tersebut sebelum penyerbuan itu berhasil. Majalah *Time* mencatat bahwa peristiwa pelarangan ini adalah: *One of the most serious confrontations between the bureaucracy and the press in recent years occurred over the Department of Defense's news blackout during the U.S. invasion of Grenada in October 1983* (Dye dan Zeigler, 1986: 289).

Kebebasan pers terbelenggu lagi oleh aturan pemerintah AS saat meletus Perang Teluk pada 1991. Pembatasan terhadap pers pada Perang Teluk lebih detail lagi. Semua informasi Perang Teluk tidak boleh diberitakan secara mendetail, terutama mengenai kekuatan militer AS, operasi-operasi intelejen yang dijalankan, dan banyak lagi hal yang harus diperhatikan media massa yang akan meliput Perang Teluk. Ada 12 item yang harus diperhatikan (tidak boleh dilakukan) oleh media massa yang tertuang dalam *The Pentagon Ruled on Media Access to the Persian Gulf War*.

Secara terinci, keduabelas item sensor itu akan dipaparkan di bawah ini. Informasi-informasi berikut ini tidak boleh disiarkan karena dianggap akan mengancam dan membahayakan operasi: (<http://www.thefileroom.org/FileRoom/document/Cases/185gulfpres.html>).

1. *For U.S. or coalition units, specific numerical information on troop strength, aircraft, weapons systems, on-hand equipment, or supplies (e.g. artillery, tanks missiles, trucks, water), including amounts of ammunition*

*or fuel moved by or on hand in support and combat units. Unit size may be described in general terms such as "company size," "multibattalion," "multidivision," "navel task force," and "carrier battle group." Number or amount of equipment and supplies may be described as "large," "small," or "many."*

2. *Any information that reveals details of future plans, operations, or strikes, including postponed or canceled operations.*
3. *Information, photography, and imagery that would reveal the specific location of military forces or show the level of scrutiny at military installations or encampments. Locations may be described as follows: all Navy embark stories can identify the ship upon which embarked as a dateline and will state that the report is coming from the "Persian Gulf," Red Sea, " or "North Arabian Sea." Stories written in Saudi Arabia may be datelined "Eastern Saudi Arabia," "Near the Kuwaiti Border," etc. For specific countries outside Saudi Arabia, stories will state that the report is coming from the Persian Gulf region unless that country has acknowledged its participation.*
4. *Rules of engagement details.*
5. *Information on intelligence collection activities, including targets, methods and results.*
6. *During an operation, specific information on friendly force troop movements, tactical deployments, and dispositions that would jeopardize operational security or lives. This would include unit designations, names of operations, and size of friendly forces involved, until released by CENTCOM.*
7. *Identification of mission aircraft points of origin, other than as land- or carrier-based.*
8. *Information on the effectiveness or ineffectiveness of enemy camouflage, cover, deception, targeting, direct and indirect fire, intelligence collection or security measures.*
9. *Specific identifying information on missing or downed aircraft or ships while search and rescue operations are underway.*

10. *Special operations task forces methods, unique equipment or tactics.*
11. *Specific operating methods and tactics (e.g. air angles of attack or speeds, or naval tactics and evasive maneuvers). General terms such as "low" or "fast" may be used.*
12. *Information on operational or support vulnerabilities that could be used against U.S. forces, such as details of major battle damage or personnel losses of specific U.S. or coalition units, until that information no longer provides tactical advantage to the enemy and is, therefore, released by CENTCOM. Damage and casualties may be described as "light," "moderate", or "heavy."*

Perang mutakhir yang dilaksanakan AS, yaitu perang di Afghanistan pada tahun 2001, telah pula menelan "korban" di kalangan media massa. Sekali lagi, pihak pemerintah AS membatasi ruang gerak media massa untuk menyiarkan aktivitas Al Qaidah yang menjadi musuh AS dalam Perang Afghanistan.

Aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah AS – dari masa ke masa — tersebut sesungguhnya merupakan sensor atas isi media massa. Dan sensor itu juga tergolong ke dalam sensor preventif. Padahal, dalam sistem sosial yang demokratis, adanya sebuah sensor merupakan pengingkaran atas asas demokrasi dan kebebasan pers.

## Mitos

Di mana pun di dunia ini memang tidak ada kebebasan pers yang mutlak, sebab media hidup di tengah berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi. Bahkan, menurut William A. Hachen dalam *The World News Prism* (1981), sistem pers yang "paling tidak terikat" atau paling bebas pun harus sejalan dengan tingkat keanekaragaman peraturan yang dikeluarkan pihak penguasa. Dan, kasus media massa AS ini dapat menjadi bukti. Di tengah masyarakat yang diklaim sebagai negeri dan masyarakat paling demokratis di dunia ini, kebebasan persnya pun masih dapat terganggu oleh kebijakan-kebijakan penguasa.

Lebih lanjut Hachen menyatakan, dalam hubungan antara pemerintah dan komunikasi massa, pertanyaan mendasar bukan apakah pemerintah mengontrol pers, melainkan seberapa jauh luasnya kontrol itu sendiri. Sebab, semua sistem pers berada pada suatu kontinum dengan pengawasan penuh (otoritarianisme) pada satu sisi sampai pada pengawasan yang relatif longgar (libertarianisme) pada sisi yang lain. Kebebasan menyatakan pendapat yang mutlak adalah mitos.

Menurut Melvin deFleur dalam *Understanding Mass Communication* (1985: 123), media massa memang tidak bisa berdiri sendiri. Pada kenyataan sehari-hari, media massa sering mendapat tekanan ekonomi dan politik (*economic and political constraints*) yang dilancarkan baik secara formal maupun informal. Oleh karena itu, menurut DeFleur, tidak ada kebebasan pers secara murni. Kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi tidak bersifat absolut. Dalam kasus-kasus khusus, kebebasan pers secara aktual berbeda dengan kerangka teoretis mengenai kebebasan pers itu sendiri. Realitas memperlihatkan pers maupun media lainnya dikelilingi oleh tekanan-tekanan ekonomi dan politik.

Pendulum kebebasan pers di AS sedang bergerak ke arah kontinum pengawasan penuh. Itu jika dilihat dari satu sisi saja, yaitu campur tangan penguasa. Apalagi jika indikator kebebasan itu diukur tidak hanya dari sisi politik (campur tangan penguasa), tetapi juga dilihat indikator lainnya seperti ekonomi. Akankah hasil survey tentang kebebasan pers tahun 2001 menempatkan AS pada skor tertinggi lagi atau terpuruk dengan kategori *partly-free press*? 

## Sumber Bacaan

- Basuki, Wishnu. 1995. *Pers dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- DeFleur, Melvin & Everett E. Dennis. 1985. *Understanding Mass Communication*. Second Edition. Boston: Houghton Mifflin.

- Downing, John, Ali Mohammadi & Annabelle Srebenny-Mohammadi. 1990. *Questioning The Media. A Critical Introduction*. Newbury Park: Sage Publications.
- Dye, Thomas R. & Harmon Zeigler. 1971. *American Politics in the Media Age*. Second Edition. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Graber, Doris A. 1971. *Mass Media and American Politic*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hatchen, William A. 1981. *The World News Prism*.
- Pember, Don R. 1971. *Mass Media in America*. Second Edition. Chicago: Science Research Associates, Inc
- Rivers, William L. Theodore Peterson, & Jay W. Jensen. 1971. *The Mass Media and Modern Society*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson & Wilbur Schramm. 1963. *Four Theories of The Press*. Urbana: University of Illinois Press.
- <http://www.freedomforum.org/tempaltes/document.asp?documentID=15124>
- <http://www.freedomhouse.org/pfs2000>
- <http://www.thefileroom.org/FileRoom/document/Cases/185gulfpres.html>.